

KOMITMEN WALI KOTA DAN BPAD KOTA DENPASAR: WUJUDKAN ARSIP SEBAGAI INDIKATOR AKUNTABILITAS KINERJA



Ruang pameran arsip BPAD Kota Denpasar

Pentingnya masa lalu yang terekam dalam arsip harus dimaknai dari sudut pandang kearifan lokal dan nasional dalam upaya mempertahankan nilai martabat bangsa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan *nations and character building* sesuai cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa. Penggalan kalimat tersebut merupakan amanat Presiden Soekarno yang disampaikan kembali oleh Wali Kota Denpasar Rai Dharmawijaya Mantra saat memberikan kata sambutan terhadap buku 'Denpasar Tempo Dulu; Melacak Dinamika Kota Denpasar Berbasis

Visual' yang diterbitkan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar (BPAD) tahun 2012.

Wali Kota Denpasar Rai Dharmawijaya Mantra sangat berharap penggalan tentang sejarah dapat diketahui generasi yang akan datang melalui ketersediaan arsip. Melalui arsip, sejarah dapat terungkap. Oleh karenanya, keberadaan BPAD merupakan lembaga yang dimaknai sebagai penjaga peradaban Kota Denpasar. Baginya, penggalan tentang sejarah memiliki nilai yang strategis, di samping merupakan pengetahuan yang sangat menarik, sejarah juga mengajarkan hal-

hal yang penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Ini sejalan dengan visi BPAD sebagai 'Wahana Pembelajaran, Pelestarian, dan Sumber Informasi dalam Pembangunan Kota Denpasar Kreatif dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan'.

BPAD yang berkantor di jalan WR. Supratman Tohpati - Denpasar ini dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Terjadi peningkatan status kelembagaan semula Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Denpasar



Kepala Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kota Denpasar
Drs. I.G.A. Rai Anom Suradi

menjadi Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kota Denpasar. Otomatis cakupan kewenangan Badan lebih luas dibanding ketika masih bernama Kantor (Perda Nomor 15 Tahun 2001). Reorganisasi kelembagaan ini merupakan amanat PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPAD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan dokumentasi kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pelestarian perpustakaan, deposit, pengembangan dan pengolahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara fungsi BPAD adalah merumuskan kebijakan teknis bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi. Reorganisasi BPAD diikuti peningkatan anggaran yang mencapai hampir Rp 1 milyar

ini, menuntut program kerja yang membumi, tidak hanya dirasakan oleh BPAD sendiri tetapi berdampak kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kota Denpasar. Itu artinya, perlu dukungan dan komitmen dari Wali Kota untuk menggerakkan SKPD berbudaya tertib arsip dalam mengelola arsip dinamisnya.

Di bawah kepemimpinan Drs. I.G.A. Rai Anom Suradi atau akrab dengan panggilan Pak Rai, BPAD mencoba melakukan beberapa terobosan program kerja dengan meminta dukungan dan komitmen dari Wali Kota Denpasar sebagai strategi ampuh guna mengatasi hambatan '*psychis*' dari lembaga kearsipan tingkat kota saat melakukan pembinaan ke SKPD, sehingga keberadaan BPAD mampu berperan dan berpengaruh terhadap SKPD dan Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah binaannya. Bak gayung bersambut Wali Kota Rai Dharmawijaya Mantra pun mendukung melalui disahkannya Surat Edaran Wali Kota tentang kearsipan, masing-masing mengenai kewajiban setiap SKPD

mencantumkan mata anggaran/dana pemeliharaan arsip; dan melibatkan BPAD dalam menentukan spesifikasi setiap pengadaan sarana dan prasarana kearsipan.

Terobosan program kerja BPAD pada awal tahun kepemimpinan pak Rai sejak tahun 2003 adalah melaksanakan lomba tertib arsip atau sebelumnya dikenal dengan kegiatan 'monitoring dan evaluasi kearsipan' tingkat SKPD di lingkungan Kota Denpasar, yang dilakukan setiap tahun secara rutin hingga sekarang. Dewan juri diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, sementara Kepala BPAD yang punya hajat, hanya menjadi wakil ketua II.

Ada logika berpikir yang menarik dalam lomba ini, karena yang diumumkan ke publik tidak hanya lima peringkat terbaik tetapi lima peringkat terendah dalam pengelolaan arsipnya. Dengan demikian setiap SKPD enggan diumumkan sebagai peringkat terendah. Lomba tertib arsip ini mau tidak mau menjadikan setiap SKPD mempersiapkan diri dalam pengelolaan arsip. Adapun *reward* yang diberikan kepada SKPD terbaik, selain piagam penghargaan dan hadiah juga mendapat kesempatan melakukan kunjungan kerja ataupun studi banding ke ANRI, yang sudah dimulai sejak tahun 2009, serta pemberian aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Target BPAD terhitung tahun 2014, seluruh SKPD diharapkan sudah menerapkan SIKD.

Lomba tertib arsip ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi dari program bimbingan teknis kearsipan pada setiap SKPD. Dampaknya berbanding lurus dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. SKPD

yang dinyatakan terbaik dalam tertib arsip dapat meminimalisir temuan dari BPK. Sebaliknya, SKPD yang dinyatakan terendah kecederungan ada temuan-temuan dari BPK. Ini berarti arsip telah berperan sebagai indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Manfaat adanya bimbingan teknis kearsipan yang dilakukan BPAD telah berimbas kepada setiap SKPD untuk lebih peduli kepada arsip. Sejalan dengan motto yang digelorkan BPAD : *'Penanganan arsip, simpan lama – cari cepat'*. Pencipta arsip wajib amankan dan rapikan sumber informasi penting, dijelaskan Pak Rai yang sebelum menjabat Kepala Badan adalah seorang Camat.

Redaksi Majalah Arsip sempat berkunjung ke Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai salah satu SKPD yang meraih Juara I dalam lomba tertib arsip pada tahun 2012.

Dukungan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai surat masuk dan surat keluar, serta Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Nomor : 188.4/ 276/ 2013 tentang Penetapan Tenaga Pengolah Kearsipan, yang tidak hanya kepada layanan administrasi perkantoran tetapi juga pendokumentasian dalam bidang adat istiadat, seni, dan warisan budaya, telah mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat, terutama melalui kegiatan perekaman dan digitalisasi bahan pustaka dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam, kegiatan ini tentunya seiring dan sejalan dengan visi BPAD.

Komitmen Wali Kota Rai Dharmawijaya Mantra terhadap pentingnya arsip selain dalam bentuk Surat Edaran yang sifatnya mengatur, juga telah dijabarkan dalam program kerja BPAD, di antaranya : pertama,

pembangunan Ruang Studio dengan kapasitas 50 orang, telah diresmikan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2013. Melalui studio ini diharapkan generasi muda dapat melihat secara visual mengenai Denpasar Tempo Dulu, Selayang Pandang Kearsipan Kota Denpasar, ataupun Tokoh Soekarno; Kedua, pembangunan Diorama Mini, dengan luas 3 x 10 meter, diharapkan menjadi miniatur sejarah sekaligus tempat rekreasi pendidikan bagi keluarga; dan ketiga, pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPAD Denpasar. PPID akan dipimpin oleh Sekretaris Badan dengan dukungan fungsional arsiparis.

Program bimbingan teknis kearsipan merupakan jenis pelayanan BPAD yang telah membuahkan hasil,



Studio Kearsipan BPAD Kota Denpasar

REGIONAL

dengan diterimanya penghargaan dari Gubernur Bali - Made Mangku Pastika saat menyambut Hari Ulang Tahun Provinsi Bali ke-55 pada 14 Agustus 2013, terhadap Desa Pemecutan Kecamatan Denpasar sebagai desa binaan BPAD yang meraih Juara I dalam Pengelolaan Arsip Masuk Desa/Kelurahan se-Provinsi Bali. Sementara di bidang perpustakaan, BPAD juga mendapatkan predikat sebagai Juara I Lomba Perpustakaan Umum tingkat Provinsi Bali.

Menurut Pak Rai – alumnus Institut Ilmu Pemerintahan (Kampus Ampera) ini, BPAD bersama-sama Wali Kota Denpasar Rai Dharmawijaya Mantra berusaha mencanangkan program unggulan lainnya, yaitu pentingnya 'pendokumentasian' pada semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kegiatan Wali Kota. Pendokumentasian yang dimaksud tidak hanya identik dengan media kertas yang dihasilkan tetapi juga dukungan media audio visual lainnya, sehingga melengkapi bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Tekad BPAD ini sudah terbukti dipilihnya BPAD sebagai Juara I Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) se-Kota Denpasar.

Dalam upaya pembinaan dan pengelolaan arsip statis yang menjadi tanggung jawab BPAD, tahun 2013 telah diselenggarakan publikasi arsip statis yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang fungsi dan peranan penting arsip statis. Melalui publikasi arsip statis diharapkan masyarakat Kota Denpasar lebih meningkat pemahamannya tentang kearsipan dan lebih mengenal sejarah daerahnya. Khazanah arsip



Para pegawai BPAD Kota Denpasar sedang mengolah arsip

statis diperoleh dari kegiatan akuisisi arsip sejak Denpasar masih berstatus Kota Administratif tahun 1978 sampai menjadi Kota Denpasar tahun 1992, dan telah dituangkan dalam daftar inventaris arsip. Selain itu ada koleksi foto-foto tahun 1920-1960, serta film/video kegiatan Pemerintah Kota Denpasar sejak tahun 2010 hingga sekarang. Kegiatan publikasi arsip statis ini juga telah mengantarkan BPAD meraih Predikat Harapan I untuk lomba Lembaga Kearsipan Kota se-Indonesia pada tahun 2013.

Tidak puas dengan keberhasilan yang dicapai, BPAD juga melakukan introspeksi melalui kajian mengenai pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam memberikan pelayanan perpustakaan dan kearsipan tahun 2012. Hasilnya, untuk kegiatan bimtek kearsipan mendapat nilai indeks kepuasan sebesar 80,97216 Menurut SK. Menpan Nomor: Kep/ 25/M.PAN/ 2/ 2004 angka tersebut termasuk dalam nilai mutu pelayanan kategori 'sangat baik', yang berarti kinerja pelayanan bimtek kearsipan di BPAD secara umum dinyatakan sangat baik.

Apa yang telah dicapai BPAD melalui bimtek kearsipan, tentunya tidak terlepas dari dukungan dan komitmen Wali Kota Denpasar yang telah memperlihatkan peran arsip sebagai indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sentralisasi kebijakan mengenai kearsipan dalam bentuk Surat Edaran Wali Kota merupakan terobosan inisiasi 'policy' yang cerdas dan patut ditiru oleh daerah lain. Ingat sejarah kearsipan di Indonesia dalam bentuk sentralisasi kebijakan dalam *Missive Gouvernement Secretarie* (MGS) Nomor 1939 tanggal 14 Agustus 1891 dari Gubernur Jenderal untuk mengirimkan *algemeen secretarie* dari setiap *residentie* ke Batavia, sampai sekarang diakui sebagai kebijakan kearsipan yang fenomenal karena mampu mengumpulkan arsip dalam khazanah terbesar di Asia bahkan dunia.

Mari kita tunggu terobosan, kiprah dan komitmen pimpinan daerah lainnya tentang kebijakan kearsipan yang mampu membawa arsip dan lembaga kearsipan sejajar dengan lembaga lainnya. (BP. Widodo)